



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Manfaat Nasionalisasi PT. Inalum Bagi Indonesia

Skripsi

Oleh

Ahsya Putri Calissa

2014330081

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Manfaat Nasionalisasi PT. Inalum Bagi Indonesia

Skripsi

Oleh

Ahsya Putri Calissa

2014330081

Pembimbing

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ahsya Putri Calissa
Nomor Pokok : 2014330081
Judul : Manfaat Nasionalisasi PT. Inalum Bagi Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 24 Juli 2018
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr.A.Irawan Justiniarto H.

: 

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A

: 

Pembimbing

Stanislaus R. Apresian, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahsya Putri Calissa
NPM : 2014330081
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Manfaat Nasionalisasi PT. Inalum Bagi Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 31 Juli 2018


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ahsya Putri Calissa

ABSTRAK

Nama : Ahsya Putri Calissa
NPM : 2014330081
Judul : Manfaat Nasionalisasi PT. Inalum Bagi Indonesia

Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi PT. Inalum yang semula merupakan sebuah perusahaan aluminium yang dimiliki oleh konsorsium yang berbasis di Jepang. Berawal dari sebuah pertanyaan penelitian “Bagaimana dampak nasionalisasi perusahaan multinasional PT Inalum dari investor Jepang oleh Pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan perusahaan?” penulis bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika proses pengambilalihan PT. Inalum yang kemudian menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara, latar belakang pengambilan keputusan mengapa kemudia PT. Inalum diprioritaskan untuk dinasionalisasi dibandingkan perusahaan asing lain yang ada di Indonesia, dan juga dampak yang kemudian ditimbulkan dari nasionalisasi PT. Inalum. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT. Inalum sebagai laporan tahunan, kajian literatur yang terkait dengan penelitian, sumber dari situs-situs internet, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nasionalisasi PT. Inalum dari pihak Jepang menunjukkan dampak yang positif bagi negara Indonesia dan juga bagi masyarakat disekitar sungai Asahan di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lokasi dari PT. Inalum, bahkan PT. Inalum dipercayakan untuk memimpin negosiasi untuk membeli saham dari PT. Freeport Indonesia untuk dikonversi menjadi saham milik Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci : Nasionalisasi, PT. Inalum, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Provinsi Sumatera Utara, Aluminium, Listrik, Investor Jepang, dan BUMN

ABSTRACT

Name : Ahsya Putri Calissa
NPM : 2014330081
Title : Manfaat Nasionalisasi PT. Inalum Bagi Indonesia

This research discusses the effort done by the Government of Indonesia to nationalize PT. Inalum which was once a company that mines aluminum owned by a consortium based in Japan. It began with a research question “How does the nationalization process done by the Government of Indonesia affects the sustainability of the multinational corporation PT. Inalum that was owned by Japanese investors?” writer has an objective to examine the dynamics of the nationalization process of PT. Inalum which status then changes from private corporation to state owned enterprise, the background of why the government decided to prioritize the nationalization of PT. Inalum compared to any other multinational corporation in Indonesia, and also the impact of the nationalization process. Writer uses qualitative research method with official document studies issued by PT. Inalum as annual reports, literature review, sources from internet sites, journals, and books that are relevant to the research topic.

The result of this research shows that the nationalization of PT. Inalum from Japanese investors made a positive impact for Indonesia and also its citizens in the Province of North Sumatera which is the site of PT. Inalum. PT. Inalum is even trusted to be the leader of negotiations regarding the Indonesian Freeport stock to be converted and combined with the rest of Indonesian Freeport stock.

Key Words : Nationalization, PT. Inalum, Hydroelectric Power Plant, the Province of North Sumatera, Aluminum, Electricity, Japanese Investors, and State Owned Enterprises

KATA PENGANTAR

Ucapan terima kasih saya berikan kepada pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

1. Tuhan yang telah memberikan saya kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya yang telah memberikan *support* selama masa pengerjaan.
3. Mas Apres selaku dosen pembimbing.
4. Mas Irawan dan Mas Giandi selaku dosen penguji sidang.
5. Adik saya, Nyanya yang sudah memberikan dukungan selama masa pengerjaan.

Untuk Ninoy terkasih.. Kamu telah menemani aku, menyemangati, membantu, dan memotivasi aku dalam pengerjaan skripsi ini. Dukungan cintamu adalah segalanya untukku.. Untuk segala bantuanmu, aku ucapkan *I Love You...*

Sumantra atau sumansimacho.. Inget ga sih dulu kita ngomongin tentang ketakutan gua ga bisa lulus bareng? Haha lucu ya sekarang di tahun 2018 ini kita akhirnya lulus bareng. Makasih ya motivasinya hehe.

Antonius rekanku sesama pecinta *dad jokes* dan *lame puns*, gua akan selalu inget kita ngakak berdua di PPAG main *dad joke off*. Kita ngusahain tanda tangan dan revisi bareng sampe akhirnya makan gratis di tengah orang yang kita ga kenal sumpah ton itu random banget gua ga akan lupa.

Gugi atau ugi bro swole gua eiiiitss, paling seneng gua kalo udah mulai ngata-ngatain feminazi sama lu, adaaa aja ejekan yang bikin ngakak sampe puas ngomongin isu-isu yang bodoh *#staywoke*.

Kaulika atau Ms. Kaulika Kaulika si tetangga yang selalu mau jemput dan nganter pulang ya soalnya emang se arah sih ya awas aja kalo gamau anter.. *Inside joke* kita tuh suka gajelas banget ya tapi ya lucu aja sih apa aja kalo lagi seru sama kamu.

Mareta si aneh yang ngerasa dirinya sempurna PADAHAL SUKA NYUSAHIN tapi aku sayang sama kamu mar soalnya masakan kamu enak sih jadi gimana lagi yaaa

Ichsan CANI selalu pengen ngebuka tarang lu abisnya malu terus sih, ayoo dong keluar dari kebeteaan lu gua tau ada seorang alpha dalam diri lu!

Orvino yang kelakuannya sama persis sama bokap gua pantesan aja ya suka pengen gua tendang kalo nyebelin tapi SANGAT SUPORTIF dan *reliable* sumpah no gua sayang banget sama lu sebagai anak yang diaku-aku sama bokap gua.

Almo *fakboi* geng DESPACITO selalu bisa diandalkan dan selalu ada marah-marah tiap hari kaya *Prince Zuko*, punya botol air minum di bentak-bentak sukanya marahin *customer service* e-commerce kaya ibu-ibu oke banget deh!

Aliya orang aneh yang selalu marah-marah kalo orang-orang salah sedikit YAGa semua orang se pinter lu gmnsi?? Sesama anak geng *Thunder and Lightning* yang pernah marah gara-gara GA SEMUA ORANG SUKA DIPELUK AHSYA!! *Love you!*

Gentha yang *request* pengen masuk ke ucapan terima kasih gua sebagai server Nyereung LU OKE BANGET!!

Sisanya ya kalian semua yang ngerasa udah *support* aku selama ngerjain baik dalam bentuk dukungan langsung maupun intimidasi klean OQ BGT! Untuk Witskiw, Quro, Fitri, Getha, Axkel, Farah, Dera, Raoul, Asti, Alda, Azar, Rama, Alan, kalian yang ga dipaparin satu-satu tapi *it doesn't mean* kalian lebih ga oke dari yang disebutin, kalian semua tetep oke banget!!

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GARFIK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Kegunaan	8
1.4 Kajian Pustaka	9
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB 2	24
<i>FOREIGN DIRECT INVESTMENT</i> DAN NASIONALISASI DI INDONESIA .	24
2.2 Gambaran Umum <i>Foreign Direct Investment</i> pada tingkatan Global dan Indonesia	24
2.2.1 Foreign Direct Investment secara global	25
2.2.2 Foreign Direct Investment di Indonesia	29
2.3 Nasionalisasi yang terjadi di Indonesia	32
BAB 3	39

Profil Perusahaan dan Perubahan Nippon Asahan Aluminium Menjadi PT. Inalum	39
3.1 Profil Perusahaan PT. Inalum	39
3.1.1 Visi, Misi dan Nilai PT. Inalum	41
3.2 Perubahan Nippon Asahan Aluminium Menjadi PT. Inalum	43
3.2.1 Perubahan Status PT. Inalum Menjadi BUMN	48
3.2.2 Tanggapan Dari Pihak Jepang	52
BAB 4	57
PT. Inalum Pasca Nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia.....	57
4.1 Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Dalam Menjamin Kelangsungan Perusahaan.....	58
4.1.1 Peran Pemerintah Daerah	59
4.1.2 Peran Pemerintah Pusat	63
4.2 Kinerja Perusahaan Setelah di Nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia.....	66
4.2.1 Gambaran Aktivitas PT. Inalum Setelah di Nasionalisasi Menurut Laporan Tahunan.....	67
4.2.1.1 Peningkatan Produktivitas	69
4.2.1.2 Meningkatnya Suplai Listrik	73
4.2.1.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara	77
4.3 Kebijakan Nasionalisasi PT. Inalum Sebagai Praktek Berhasil Pemerintah Indonesia	77
BAB V.....	81
Kesimpulan	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Komposisi Penjualan Aluminium Domestik dan Ekspor (dalam AS\$ ribu).....	73
-----------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1	Peringkat Negara Produsen Aluminium (juta ton)	67
Grafik 4. 2	Komposisi Pasokan dan Permintaan Aluminium 2004-2014.....	71
Grafik 4. 3	Perkembangan Penjualan Listrik PT. Inalum ke PT. PLN Indonesia (dibuat dalam AS\$ ribu).....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nasionalisasi perusahaan merupakan langkah dimana pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan multinasional dan menjadikannya badan usaha milik negara (BUMN). Pengambilalihan perusahaan yang bersangkutan biasanya dengan cara mengambil mayoritas saham atau bahkan seluruh saham perusahaan multinasional.¹ Nasionalisasi perusahaan dapat terjadi baik bagi perusahaan multinasional domestik maupun perusahaan asing. Proses pengambilalihan perusahaan multinasional cukup kompleks karena salah satu ketentuan pemerintah dapat melakukan nasionalisasi adalah dengan membayar kompensasi atas keuntungan yang diraup perusahaan baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang.² Permasalahan lainnya adalah nasionalisasi perusahaan yang dilakukan harus sesuai dengan kontrak tertulis antara pemerintah dengan perusahaan yang bersangkutan dan dalam beberapa kasus, proses nasionalisasi terjadi di dalam masa kontrak sehingga kompensasi yang harus dibayar oleh pemerintah bukan hanya kompensasi keuntungan melainkan juga harus membayar pelepasan kontrak dengan perusahaan tersebut. *Locus standum* pemerintah negara yang bersangkutan memberikan kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan

¹ Paul Cantor, "Nationalization, Socialism, and the Optimum Size of the State Sector," *Socio-Econ Plan* Vol. 24, No. 2 (1990): 155

² Rudolf Hilferding, *Finance Capital*, hlm. 234.

multinasional³ memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengambilalihan perusahaan untuk mendapatkan *bargaining point* sehingga negara memiliki kuasa penuh atas perusahaan yang bersangkutan.

Permasalahan mengenai investasi asing yang mendominasi salah satu sektor perekonomian Indonesia dalam hal ini adalah sektor pertambangan telah menjadi salah satu poin penting bagi pemerintah Indonesia. Kekhawatiran pemerintah akan mengalirnya keuntungan PT. Inalum ke investor asing di Jepang telah mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memproses akuisisi PT. Inalum dan mengakhiri campur tangan pemegang saham Nippon Asahan Aluminium dalam kegiatan pertambangan PT. Inalum dan menarik PT. Inalum agar jadi badan usaha milik negara seutuhnya.⁴

Proses nasionalisasi dapat menjadi tantangan bagi negara – negara berkembang. Utamanya adalah karena mayoritas negara berkembang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengelola perusahaan yang bersangkutan. Definisi negara berkembang sendiri dapat dilihat dari sisi ekonomi dan sosiologi. Secara ekonomi, menurut jurnal yang dirilis oleh PBB tentang definisi dan indikator negara berkembang dapat dilihat dari *gross national income* (*GNI*) kurang dari 1.006 dolar AS hingga 3.976 dolar AS.⁵ Indikator lain yang dapat menjadi acuan negara berkembang adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahunan. Secara sosiologis, negara berkembang dapat diartikan sebagai

³ Huala Adolf, "Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hal 56-58.

⁴ "About us," *PT. Inalum*, <http://www.inalum.id/about-us.html>.

⁵ James Petras, "Dependency and World System Theory: A Critique and New Directions," *Latin American Perspectives* Vol. 8, No. 3, (1981): hal 149-150.

negara yang belum mencapai tingkat industrialisasi yang relatif rendah yang memiliki hubungan langsung dengan rendahnya standar hidup penduduk negara tersebut. Negara berkembang umumnya adalah negara – negara yang proses pembangunan negaranya terhambat dikarenakan adanya korelasi kuat antara populasi yang tinggi dan pendapatan masyarakat yang relatif rendah sehingga perkembangan infrastruktur jadi terhambat.⁶

Kecenderungan kebijakan ekonomi negara berkembang adalah membuka akses investasi asing dalam berbagai sektor ekonomi dan juga sumberdaya alam. Fenomena ini didukung oleh teori dependensi karena ekonomi sebuah negara berkembang dikendalikan oleh negara yang lebih dominan dalam hal ini dari segi keamanan ekonomi. Dengan alasan tersebut negara berkembang tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi dan hampir semua kebijakan ekonomi selalu lebih menguntungkan untuk investor dari negara yang lebih mapan.⁷

Dengan mengadakan penelitian ini maka diharapkan menjadi sebuah tambahan paradigma baru bagi pembaca tentang nasionalisasi sebuah perusahaan asing dan juga dampak apa yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut dan proses bagaimana nasionalisasi tersebut terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat meninjau faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya keputusan nasionalisasi tersebut sehingga dapat dikaji lebih lanjut mengenai dampak positif dan negatif yang terjadi setelah proses nasionalisasi perusahaan berhasil dilakukan.

⁶ Arthur Sullivan, *Economics: Principles in Action*, (New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2007), hal. 471.

⁷ Tony Smith, "The Underdevelopment of Development Literature: The Case of Dependency Theory," *Journal Of World Politics*, (Januari, 1979): hal. 247-288.

1.2 Identifikasi Masalah

Perkembangan perekonomian internasional melahirkan aktor – aktor baru dalam kegiatan ekonomi global. Aktor – aktor yang dimaksud adalah perusahaan multinasional, organisasi ekonomi internasional, juga individu. Namun kedudukan aktor non negara masih di bawah yurisdiksi negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Keterlibatan aktor non negara menjadi tantangan bagi negara terlebih apabila aktor non negara yang bersangkutan memegang peran yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi dalam negeri.

Dalam penelitian ini aktor non negara yang akan dibahas adalah perusahaan multinasional dan kegiatan *foreign direct investment* dalam perekonomian suatu negara. Perusahaan multinasional yang dimaksud adalah PT Indonesia Aluminium (Inalum) yang merupakan perusahaan yang berkegiatan di Indonesia dan dikuasai oleh pemegang saham asing dari Jepang dalam bentuk kontrak kerja sama. Investor asing yang berasal dari Jepang merupakan pihak konsultan, kimia, dan metal Jepang yaitu Nippon Asahan Aluminium. PT. Inalum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah Sumatera Utara, Indonesia.⁸ Seiring waktu, keuntungan yang didapatkan oleh PT. Inalum jatuh ke tangan investor Jepang melainkan mengisi kas negara Indonesia sebagai penyedia sumber daya aluminium yang menjadi bahan pokok dalam berjalannya proses produksi PT. Inalum. Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil alih keuntungan PT. Inalum adalah melakukan nasionalisasi terhadap PT. Inalum dari tangan investor Jepang.

⁸ “About us,” *PT. Inalum*, <http://www.inalum.id/about-us.html>.

Keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia bukan lagi hanya isu tradisional yang hanya menyangkut aspek ekonomi saja namun menyangkut aspek sosial spesifiknya di wilayah yang terkena dampak langsung dari kegiatan PT. Inalum yaitu warga Sumatera Utara. Terlebih lagi pengerukan sumber daya aluminium yang semakin menipis seiring waktu dan jika tidak diambil alih oleh pemerintah Indonesia akan habis sebelum Indonesia dapat merasakan hasil dari keuntungan yang didatangkan oleh kelimpahan sumber daya yang tertanam di tanah Indonesia. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu pendorong pemerintah akhirnya mengusahakan untuk mengambil alih perusahaan PT. Inalum dan menjadi pengambil keputusan utama pada tahun 2013 yang lampau.⁹

Nasionalisasi perusahaan sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya merupakan langkah dimana pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan multinasional dan menjadikannya badan usaha milik negara dengan cara mengambil alih mayoritas saham atau bahkan seluruh saham perusahaan multinasional yang bersangkutan.¹⁰ Pemerintah Indonesia melakukan pengambilalihan PT. Inalum dengan alasan agar hasil keuntungan yang didapat oleh PT. Inalum masuk ke kas negara Indonesia. Uang negara telah disetujui untuk dialokasikan sebagai dana pengambilalihan saham Inalum sebesar 7 triliun

⁹ Miko Kamal, "Nasionalisasi Inalum dan Hibah Saham," *Hukum Online*, 10 Desember, 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a733e632b8e/nasionalisasi-inalum-dan-hibah-saham-broleh--miko-kamal--phd->.

¹⁰ Paul Cantor, "Nationalization, Socialism, and the Optimum Size of the State Sector," *Socio-Econ Plan* Vol. 24, No. 2 (1990): 155.

rupiah untuk membeli 58,88 persen saham PT. Inalum.¹¹ Perihal yang harus diperhatikan lainnya adalah kesiapan negara Indonesia yang infrastruktur tambangnya masih dipertanyakan untuk melanjutkan kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Inalum setelah proses nasionalisasi dilakukan.

PT Indonesia Aluminium (Inalum) merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di sektor pertambangan aluminium yang merupakan sebuah bentuk investasi asing dari Jepang. PT. Inalum didirikan pada tanggal 6 Januari tahun 1976 sebagai bentuk penanaman modal asing. Keberadaan PT. Inalum telah menjadi acuan pengembangan industri tambang aluminium yang dianggap paling signifikan. Status PT. Inalum sebagai perusahaan multinasional milik asing dicabut ketika pemerintah mengakuisisi PT. Inalum pada tanggal 9 Desember tahun 2013 yang lalu yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan pihak PT. Inalum.¹²

Dalam proses pengambilalihan PT. Inalum, permasalahan yang dialami oleh pemerintah Indonesia adalah terkait perbedaan nilai antara Indonesia dengan Jepang mengenai harga saham yang akan diakuisisi oleh Indonesia sebesar 58,87 persen. Perbedaan nilai hingga sebesar 200 juta dolar AS sehingga pemerintah Indonesia dan pihak Jepang memutuskan untuk menyelesaikan masalah melalui beberapa pertemuan dengan *investment disputes* dan akhirnya disepakati di angka tengah yaitu sekitar 550 dolar AS atau sebesar 5.5 triliun rupiah.¹³ Proses

¹¹ Miko Kamal, *loc. cit.*

¹² PT. Inalum, "About us," *PT. Inalum*, <http://www.inalum.id/about-us.html>.

¹³ Ferdian Nevri Putra, "Nasionalisasi PT. Inalum Oleh Pemerintah Indonesia," 14 Desember, 2013, <http://bem.feb.ugm.ac.id/nasionalisasi-pt-inalum-oleh-pemerintah-Indonesia/>.

nasionalisasi PT. Inalum oleh pemerintah Indonesia terjadi atas beberapa faktor baik faktor pendorong maupun faktor penarik dan akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, aktor utama yang akan dianalisa adalah pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan perekonomian negara. Selain Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah pusat, aktor lain yang akan dikaji adalah Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Dikarenakan adanya asas desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia, pemerintah daerah memegang peran yang cukup signifikan dalam proses pengambilalihan perusahaan hingga pengelolaan perusahaan setelah dinasionalisasi. Aktor lain yang berpengaruh dalam kasus penelitian ini adalah pihak PT. Inalum sebagai perusahaan multinasional yang di akuisisi oleh pemerintah Indonesia dari investor asing di Jepang. Kasus yang akan ditekankan dalam penelitian ini berhubungan dengan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melakukan proses nasionalisasi terhadap PT. Inalum termasuk faktor pendorong dan penarik proses nasionalisasi yang dilakukan.

Penulis akan membatasi permasalahan pada analisis faktor dominan keberhasilan proses nasionalisasi PT. Inalum oleh pemerintah Indonesia dan juga mengkaji proses akuisisi sekitar tahun 2010 hingga keberhasilan nasionalisasi PT. Inalum pada tahun 2013 yang lampau. Sehingga berdasarkan jangka waktu yang disebutkan, penulis akan mengkaji persiapan pemerintah Indonesia dalam upaya mengambil alih PT. Inalum hingga kesuksesannya tanggal 30 Oktober 2013.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang telah disebutkan, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yaitu; **Apakah manfaat nasionalisasi perusahaan multinasional PT. Inalum dari investor Jepang bagi Indonesia?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini akan dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mengkaji proses nasionalisasi perusahaan tambang – PT. Inalum – oleh pemerintah Indonesia dan faktor baik pendorong maupun penarik mengenai keberhasilan pemerintah Indonesia mengambil alih aset negara juga keuntungan yang dapat dialirkan ke kas negara.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap kepustakaan Hubungan Internasional mengenai peristiwa keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi perusahaan tambang PT. Inalum sebagai langkah pengambilalihan aset negara dari investor asing. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang juga tertarik mengenai proses nasionalisasi yang terjadi di Indonesia berkenaan dengan isu ekonomi di ranah hubungan internasional.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian literatur merupakan sebuah telaah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan baik secara teoritis maupun empiris.

Pada tahun 2013, dalam jurnal *Utilities Policy* yang berjudul *from privatization to nationalization* membahas mengenai kasus re-nasionalisasi yang terjadi di Argentina terhadap perusahaan Repsol pada tahun 2012 yang lalu. Proses re-nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Argentina berawal pada bulan Maret tahun 2006. Pemerintah Argentina menganggap bahwa mengambil alih perusahaan merupakan langkah yang tepat mengingat munculnya kasus korupsi yang terhubung langsung dengan wakil presiden Argentina pada saat itu Amado Boudou. Perusahaan yang diambil alih yaitu Repsol perusahaan yang bergulat di sektor industri pertambangan minyak di tanah Argentina. Pengambilalihan perusahaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *national interest* Argentina mengenai agenda memperbaiki permasalahan internal yaitu korupsi yang terus menerus merugikan iklim ekonomi dalam negara Argentina sendiri.

Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Argentina merupakan salah satu langkah dalam agenda panjang pemerintah dalam mengeksekusikan kebijakan proteksionis negara juga keputusan untuk mengintervensi peran aktor ekonomi asing oleh pemerintah Argentina. Faktor lain yang menjadi pendorong pemerintah Argentina untuk segera mengambilalih perusahaan Repsol adalah keeratan perusahaan dengan beberapa pihak pemerintahan yang akhirnya

memunculkan *crony capitalism* yaitu keadaan dimana perusahaan yang memiliki kedekatan dengan beberapa pihak pemerintah mendapatkan kekuatan lebih dari sebatas aktor non negara yang akhirnya pun memunculkan krisis sosial. Pemerintah Argentina memiliki anggapan bahwa pengambilalihan perusahaan multinasional Repsol akan sedikit demi sedikit menghilangkan krisis sosial yang dimunculkan dari pihak pemerintahan itu sendiri. Argentina sebagai negara berdaulat memiliki hak penuh untuk mengambil alih sumber daya negaranya, dalam kasus ini adalah minyak dan gas, namun pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi dan obligasi yang sudah ditentukan yang akhirnya menjadi masalah karena menghalangi proses nasionalisasi perusahaan Repsol.¹⁴

Melalui jurnal *from privatization to nationalization*, penulis dapat mengetahui beberapa faktor pendorong pemerintah melakukan nasionalisasi dan yurisdiksi pemerintah dalam perekonomian internasional menghadapi aktor non negara, dalam hal ini adalah perusahaan multinasional. Penulis juga dapat menganalisis apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan nasionalisasi dan konsep *national interest* yang tercantum dalam jurnal yang juga digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam menulis penelitian ini.

Literatur kedua yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini membahas mengenai nasionalisasi sebagai isu ekonomi yang dimuat dalam jurnal berjudul *Nationalization, Socialism, and the Optimum Size of the State Sector* oleh

¹⁴ Joaquin Melgarejo Morena, "From Privatisation to Nationalisation: Repsol-YPF," *Utilities Policy*, Vol. 26, (2013): hal. 45-46.

Paul Cantor. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa proses nasionalisasi merupakan proses yang mengarah ke perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Perkembangan ekonomi yang dimaksud mengacu ke perpindahan dana keuntungan perusahaan dari tangan investor asing kembali ke kas negara. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa nasionalisasi merupakan satu dari beberapa cara untuk pemerintah mengintervensi kegiatan ekonomi agar pasar domestik dapat bekerja lebih baik dari sudut pandang pemerintah.¹⁵

Jurnal ini membantu penulis dalam memahami jurisdiksi negara dalam mengintervensi kegiatan ekonomi dengan cara melakukan nasionalisasi sebagai langkah pembangunan ekonomi domestik juga dampak setelah nasionalisasi itu terjadi baik dari aspek sumber daya manusia maupun kelancaran perusahaan yang bersangkutan.

Literatur ketiga yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *Economic Growth and Foreign Direct Investment Inflows: The Case of Qatar* oleh Mohammad Amin Almfraji dan Mahmoud Khalid Almsafir. Dalam jurnal dipaparkan bahwa *foreign direct investment* memegang peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jurnal ini membahas mengenai kasus *foreign direct investment* yang terjadi di Qatar dan hubungannya terhadap terbukanya

¹⁵ Paul Cantor, "Nationalization, Socialism, and the Optimum Size of the State Sector," *Socio-Econ. Plan*, Vol. 24, No. 2 (1990): hal. 155-156.

export market dan juga membuka jalur lebih luas bagi investor domestik ketika produktivitas meningkat akibat investasi asing di Qatar.¹⁶

Literatur ini membantu penulis memahami lebih lanjut mengenai pentingnya konsep *foreign direct investment* dalam proses pertumbuhan salah satu sektor ekonomi dalam sebuah negara. Menggunakan jurnal ini juga, penulis dapat mengidentifikasi lebih dalam apa faktor yang menyebabkan pemerintah membutuhkan *foreign direct investment* dan kemungkinan yang akan terjadi terhadap perekonomian domestik jika alur *foreign direct investment* terputus dari pemerintah sebuah negara. Jurnal ini juga mengkaji mengenai kelebihan dan kekurangan konsep *foreign direct investment* dalam keberlangsungan kegiatan negara dalam perekonomian internasional.

Literatur keempat yang akan dikaji adalah mengenai sejarah pengakuisisian Bank Indonesia yang diterbitkan oleh pihak Bank Indonesia dalam bentuk laporan resmi berjudul *History of Bank Indonesia: Institution*. Dalam laporan resmi dijelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan bank sentral yang dikuasai oleh Belanda bernama *De Javasche Bank* yang kemudian di nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1951. Hal ini dilakukan atas dasar upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk bank sentral Republik Indonesia. Pada tahun 1951, pemerintah membentuk *Committee for the Nationalization of Javasche Bank NV* yang kemudian memiliki tugas utama yaitu membeli saham *De Javasche Bank*. Dengan 99,4% saham *De Javasche Bank* dimiliki oleh

¹⁶ Mohammad Amin Almfraji, Mahmoud Khalid Almsafir, "Economic Growth and Foreign Direct Investment Inflows: The Case of Qatar," *Social and Behavioral Sciences*, Vol. 109 (2014): hal. 1040-1041.

Indonesia dan 0,6% saham ditetapkan tidak jelas kepemilikannya, *De Javasche Bank* secara resmi telah dinasionalisasi dan melalui undang-undang nomor 11 tahun 1953, pemerintah Indonesia menyatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Keberlangsungan Bank Indonesia setelah diakuisisi berada di bawah dewan moneter, direktur, dan penasihat dan memiliki peran sebagai bank sentral yaitu mengedarkan, membuat regulasi, dan mengawasi kegiatan bank di Indonesia yang lainnya. Melalui laporan resmi sejarah Bank Indonesia, penulis dapat mengkaji langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menasionalisasi sebuah perusahaan asing. Penulis juga mampu mengkaji mengenai keberhasilan berlangsungnya Bank Indonesia sebagai bank sentral setelah diakuisisi dan berjalan dibawah pemerintah Indonesia.¹⁷

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam dunia perekonomian internasional, perusahaan multinasional telah menjadi salah satu aktor yang dianggap cukup penting dalam keberlangsungan perdagangan internasional. Perusahaan multinasional sendiri dapat diartikan sebagai perusahaan yang mengatur dan mengelola proses produksi terutama dalam pabrik yang terletak di dua negara atau lebih.¹⁸ Perusahaan multinasional dianggap sebagai aktor mandiri yang sudah memiliki kekuatan di ranah

¹⁷ Bank Indonesia, *History of Bank Indonesia: Institution*, <http://www.bi.go.id/en/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/06f05e1acbf14f34925666e72708e56eMicrosoftWordHistoryofInstitutionPeriod19531959.pdf>, (diakses tanggal 14 Februari, 2018).

¹⁸ Jeffrey A. Frieden, *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, (London: 2003), hal. 145.

perekonomian dunia yang merupakan kepanjangan tangan dari negara asal perusahaan yang bersangkutan.¹⁹

Peran perusahaan multinasional yang terus berkembang dalam investasi bisnis dalam suatu negara tentu menjadi tantangan posisi negara sebagai aktor terpenting dalam kegiatan perekonomian dalam negeri,²⁰ terutama ketika keterlibatan perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan yang seharusnya dimiliki negara dalam proses produksi perusahaan yang bersangkutan.²¹ Menghadapi hal ini, pemerintah sebagai pengambil keputusan tertinggi dapat melakukan pengambilalihan perusahaan multinasional agar perusahaan tersebut seutuhnya berada di bawah negara. Proses pengambilalihan perusahaan dapat dikenal juga dengan proses nasionalisasi perusahaan.²²

Dalam kajian keilmuan hubungan internasional, isu dan fenomena sudah bergerak berkembang dan dalam pembahasannya, aktor internasional perusahaan multinasional pun sudah menjadi salah satu pemegang peran yang cukup penting dalam hubungan internasional. Adapun penelitian ini mengkaji langsung mengenai kajian hubungan internasional di bidang ekonomi karena akan menganalisis hubungan aktor non negara, perusahaan multinasional, dengan negara. Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, maka perlu beberapa konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisa lebih jauh dalam mendeskripsikan penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih

¹⁹ Ibid, hlm. 5.

²⁰ Ibid, hlm. 11.

²¹ Ibid, hlm. 146-147.

²² Dieter Bos, *Public Enterprise Economics*, (New York: ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING COMPANY, INC., 1989), hal. 25.

terstruktur dan komprehensif. Dalam kerangka teori akan dipaparkan teori yang dianggap tepat untuk mengkaji penelitian ini yaitu teori merkantilisme. Konsep yang akan digunakan untuk membantu menganalisa lebih dalam adalah konsep *foreign direct investment* dan juga *national interest*.

Teori realisme ekonomi atau lazim disebut merkantilime merupakan teori yang dapat membantu penulis mengkaji hubungan perusahaan multinasional dengan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Merkantilisme muncul di abad ke-16 sebagai bentuk awal dari pengkajian mengenai kegiatan ekonomi internasional.

Merkantilisme seperti yang dijelaskan oleh Alexander Hamilton pada masa awal Amerika Serikat berdiri dideskripsikan sebagai sebuah kebijakan penguasaan industri-industri tertentu yang memiliki kemungkinan mewujudkan kebaikan bersama untuk masyarakatnya.²³ Teori ini juga dapat dijelaskan sebagai bentuk proteksionisme, monopoli, dan intervensi yang dilakukan negara untuk memberikan kontribusi terbaik bagi publik.²⁴

Merkantilisme sendiri dapat diartikan sebagai doktrin yang menyatakan bahwa dekatnya hubungan kekayaan negara dengan kekuatan yang dipegangnya, dinyatakan juga bahwa keterkaitan antara kekayaan negara dengan kekuatan negara yang bersangkutan adalah tujuan utama dari kegiatan ekonomi internasional dan menjadi kebijakan utama sebuah negara. Tanpa disadari negara

²³ Michael Lind, "Hamilton's Legacy," *The Wilson Quarterly* (1976) vol. 18, no. 3 (Summer 1994): hal 40.

²⁴ J.W. Horrocks, *A Short Story of Mercantilism*, (New York: Bretano's, 1925), hal. 1.

yang menerapkan doktrin merkantilis berada di dalam situasi *zero sum game* dalam perekonomian internasional.²⁵

Meski banyak perdebatan mengenai definisi asli dari merkantilisme, beberapa tokoh yang menjadi sorotan dalam sejarah ekonomi yang mengkaji mengenai merkantilisme seperti Wilhelm Roscher menyatakan bahwa singkatnya, merkantilisme adalah teori mengenai *state building* yang terkait dekat dengan perekonomian domestik negara yang bersangkutan.²⁶ Kebijakan utama yang dilahirkan oleh doktrin merkantilisme yang terlihat jelas adalah kebijakan proteksionisme mengenai regulasi ekonomi negara. Tokoh lain yang cukup signifikan dalam perkembangan teori merkantilisme adalah Adam Smith dan Thomas Mun. Sejarahnya, konsep ‘merkantilis’ sudah muncul sejak tahun 1763 dalam buku *Philosophie Rurale* dan disebut sebagai *systeme mercantile*.²⁷ Namun setelah kemunculannya dalam *Philosophie Rurale*, ‘*mercantile system*’ yang dikemukakan oleh Adam Smith lah yang mendunia dalam bukunya *Wealth of Nations*, Smith memaparkan mengenai karakteristik sistem merkantilis yang membedakan kekayaan dengan uang dimana kekayaan mencakup aset negara yang akan mendorong kekuatan negara yang bersangkutan.²⁸

Dalam mengkaji kasus nasionalisasi PT. Inalum oleh pemerintah Indonesia, teori merkantilisme merupakan teori yang dapat digunakan untuk mengkaji kasus secara komprehensif. Dalam pembahasannya, merkantilisme merupakan teori

²⁵ Jeffrey A. Frieden, *op. cit.*, hlm 69.

²⁶ Lars Magnusson, *The Political Economy of Mercantilism*, (New York: Routledge, 2015), hal 3.

²⁷ Gabriel Sabbagh, *Contributions to Political Economy*, vol 34, No. 1 (2015): 105–124.

²⁸ Adam Smith, *Wealth of Nation*, (New York: Cosimo Inc., 1901), hal 558-563.

yang menyatakan keterkaitan kuat antara kekayaan negara dengan kekuatan yang dipegang oleh negara yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia. Nasionalisasi merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengambil alih keuntungan hasil produksi PT. Inalum agar mengalir ke kas negara, menjadi bagian dari kekayaan negara dalam bentuk uang dan juga pengambilalihan aset sumber daya aluminium yang dimiliki negara Indonesia dari tangan pemegang saham Jepang yaitu *wealth* atau kekayaan non uang yang disebutkan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation*.

Konsep *foreign direct investment* merupakan konsep yang membahas mengenai aliran dana modal dari satu negara (*home country*) ke negara lain (*host country*). Aliran dana ini membangun aset internasional *home country* khususnya mengenai saham sebuah perusahaan multinasional yang berada di bawah kendali pihak *home country* sebagai investor asing di *host country*. Bahasan lain adalah mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan di bawah tangan *host country* secara sebagian maupun keseluruhan di perusahaan multinasional yang terletak di *host country*. Aktivitas ekonomi yang dimaksud adalah proses produksi, kontrak pekerjaan, penjualan dan pembelian, dan juga pengaturan dana modal.²⁹

Jepang merupakan negara yang 25 persen aktivitas perusahaannya terletak di luar negeri. Menurut *Japan External Trade Organization*, investor Jepang cenderung lebih tertarik menginvestasikan modalnya di negara – negara

²⁹ Robert E. Lipsey, *Home and Host Country Effects of FDI*, Cambridge, Oktober, 2002.

berkembang di Asia.³⁰ Nippon Asahan Aluminium (NAA) merupakan salah satu pihak investor asing Jepang yang menanamkan modal asing di perusahaan tambang PT. Inalum di Indonesia sebagai *shareholder*. Dalam prosesnya, *foreign direct investment* merupakan kendaraan yang cukup penting dalam hal perpindahan teknologi yang kontribusinya lebih besar dibandingkan dengan investasi domestik.³¹ Proses perpindahan teknologi merupakan sesuatu yang esensial ketika mengkaji mengenai sektor pertambangan dimana kesiapan pihak untuk mengelola perusahaan tambang sangat tergantung oleh apakah teknologi pertambangannya sudah memadai atau belum sehingga NAA sebagai investor asing memegang peran penting dalam keberlangsungan perusahaan tambang PT. Inalum. Kesiapan pemerintah Indonesia dalam melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan tambang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia siap memotong alur dana investasi asing dari Jepang dan memegang kontrol penuh mengenai proses perpindahan teknologi.

Konsep berikutnya yang akan digunakan dalam mengkaji nasionalisasi perusahaan PT. Inalum adalah konsep *national interest*. Dalam pembahasannya, secara politis, konsep *national interest* dapat diartikan sebagai ketertarikan umum atau keinginan untuk terlibat dalam rangka adanya tujuan tertentu mengenai sesuatu baik barang maupun keuangan.³² Konsep *national interest* dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan luar negeri sebuah

³⁰ Ashoka Mody, *Foreign Direct Investment and the World Economy*, (New York: Routledge, 2007), hal. 53-55.

³¹ E. Borensztein, "How does foreign direct investment affect economic growth?," *Journal of International Economics* Vol. 45 (2015): hal. 117.

³² Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, (London: Palgrave Macmillan UK), hal . 8-10.

negara untuk membenarkan atau merasionalkan perilaku negara di dunia internasional.³³

Terdapat pula *calvo doctrine* yang merupakan doktrin yang melahirkan klausa mengenai fenomena nasionalisasi dan penjelasan mengapa proses nasionalisasi merupakan sesuatu yang legal untuk dilakukan oleh suatu negara. *Calvo doctrine* menyatakan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam ranah ekonomi internasional memiliki hak atas segala kepemilikan tanah, air, dan segala yang terletak di tanah dalam negeri dan negara memiliki kapabilitas untuk mengambil alih segala aset perusahaan multinasional milik asing yang berada di tanahnya. Doktrin ini melahirkan *calvo clause* yang dapat ditemukan di dalam kontrak antara *home country* dan *host country* dalam rangka melakukan perjanjian untuk penanaman modal asing berupa sebuah perusahaan multinasional. Dengan adanya *calvo clause*, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil alih segala aset milik perusahaan asing yang bersangkutan dengan prinsip nasionalisasi yaitu *effective*, *adequate*, dan *prompt*. Jika di awal kontrak *calvo clause* telah disepakati oleh kedua pihak maka negara memiliki kewenangan penuh untuk menasionalisasi perusahaan secara legal dengan kompensasi yang akan disepakati.³⁴

³³ Ibid, hal . 32-35.

³⁴ Patrick Juillard, *Calvo Doctrine and Calvo Clause*, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2007.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, akan digunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang dimaksud adalah mengenai klarifikasi data dan makna dari perilaku aktor – aktor hubungan internasional yaitu negara dan perusahaan multinasional dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial secara mendalam.³⁵ Penelitian kualitatif dianggap metode yang efektif dalam membantu penulis merangkai penelitian karena dapat digunakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara mengkaji hubungan antarvariabel.³⁶ Penulis juga akan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang mencakup upaya menganalisis data secara induktif lalu penulis akan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan.³⁷

Pengaplikasian metode kualitatif dalam penelitian ini akan digunakan untuk menyempitkan hipotesis yang ada sehingga menjurus ke kesimpulan yang lebih akurat. Dalam penggunaannya, penulis akan mencari kesimpulan dari fenomena yang terjadi. Fenomena yang bersangkutan akan dikaji dari partisipan dan perilakunya dalam aktivitas yang menyangkut fenomena tersebut.³⁸ Dalam penelitian ini, fenomena yang akan dikaji merupakan fenomena nasionalisasi sebuah perusahaan multinasional PT. Inalum. Partisipan yang akan diidentifikasi untuk diobservasi adalah Pemerintah Indonesia dan investor Jepang. Penulis akan

³⁵ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 18.

³⁶ Ibid, hal. 21.

³⁷ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, (California: SAGE Publications, 2009), hal. 4.

³⁸ Ibid, hal. 13-14.

meneliti faktor lain seperti harga saham perusahaan, jumlah produksi PT. Inalum, dan juga kondisi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi nasionalisasi. Faktor-faktor inilah yang dianggap akan memengaruhi proses nasionalisasi hingga dinamika perusahaan setelah sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah teknik observasi, *focus group discussion* (FGD), kuesioner, studi dokumen, dan teknik triangulasi. Observasi atau pengamatan adalah proses pengumpulan data dimana peneliti melihat situasi penelitian. Jenis teknik observasi dapat dibagi tiga menjadi observasi partisipatif yaitu dimana peneliti terlibat dalam keseharian situasi yang diteliti, observasi tersamar dimana peneliti mengamati secara tersamar dengan tujuan untuk menghindari jika suatu data yang dicari masih dirahasiakan, dan observasi tak terstruktur yaitu dimana peneliti mengamati tanpa menggunakan arahan observasi. FGD adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan segenap orang dalam segmen tertentu dan membentuk kelompok diskusi yang bukan berupa wawancara. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yaitu dengan cara menggunakan angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab responden. Teknik studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari dokumen yang ada seperti buku, jurnal, surat resmi, perjanjian, undang-undang, hibah, dan lainnya. Secara

umum, dalam studi dokumentasi sumber yang dijadikan acuan adalah sumber tertulis, gambar, grafik, dan sebagainya yang dapat membantu melengkapi data dalam penelitian. Terakhir merupakan teknik triangulasi yaitu cara memeriksa data yang paling umum digunakan dengan cara memanfaatkan data lain diluar data yang didapat untuk proses pengecekan atau sebagai pembangung terhadap data yang bersangkutan.³⁹

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik studi kepustakaan dan data sekunder sebagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Penulis akan mengumpulkan data melalui studi mengenai dokumen yang bersumber dari artikel yang sudah terqualifikasi yaitu laporan tahunan PT. Inalum, media yang dikeluarkan oleh kementerian perindustrian, DPR RI, kementerian keuangan, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan dengan topik pembahasan.⁴⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab dimana bab I adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, *literature review*, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Segala hal yang dipaparkan dalam bab I masih bersifat umum dan mendasar dimana akan dipaparkan lebih komprehensif di bab – bab berikutnya.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Bab II akan membahas mengenai profil PT. Inalum sebagai perusahaan multinasional yang memegang peran aktor non negara yang melakukan *foreign direct investment* di bidang pertambangan di Indonesia.

Bab III akan membahas mengenai permasalahan mengenai peristiwa nasionalisasi perusahaan yang terjadi di Indonesia di masa lampau – nasionalisasi PT KAI. Dalam bab III juga akan dibahas secara singkat mengenai proses keberhasilan nasionalisasi dan aspek apa yang memiliki keterkaitan dengan indikasi keberhasilan nasionalisasi PT. Inalum.

Bab IV akan mengkaji mengenai keberhasilan nasionalisasi PT. Inalum oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana kecenderungan kebijakan politik ekonomi internasional Indonesia sebagai negara berkembang dalam mempersiapkan proses pengambilalihan PT. Inalum hingga mencapai keberhasilan.

Bab V akan membahas mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai dampak nasionalisasi PT. Inalum oleh Pemerintah Indonesia dan perbandingan dinamika perusahaan sebelum dan setelah dinasionalisasi.